BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU

RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI 1

BAB. I : PENDAHULUAN 2
A. LATAR BELAKANG 2
B. LANDASAN HUKUM 3
C. MAKSUD DAN TUJUAN 4
D. SISTEMATIKA PENULISAN 4

BAB. II : EVALUASI PERENCANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA 6
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU..... 6
B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN 11

BAB. III : TUJUAN DAN SASARAN 13
A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH.....13
B. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 15
C. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....17
D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 18

BAB. IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... 21

BAB. V : PENUTUP 33

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan renja Perangkat Daerah adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir;
f. penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026;

10. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026;

11. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Bappeda kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat daerah, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan serta penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini memuat :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan;

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat :

3.1. Visi dan misi pembangunan daerah;

3.2. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.3. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

Tujuan pelaksanaan evaluasi adalah sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bappeda Kabupaten Labuhanbatu tahun 2024 untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan serta Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Secara umum Bappeda Kabupaten Labuhanbatu telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perencana pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu secara proporsional. Dari hasil evaluasi rencana kerja pada tahun 2024, hampir seluruh program dan kegiatan yang direncanakan, dapat direalisasikan dengan optimal.

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 Bappeda Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagaimana tabel berikut:

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada susunan RKPD:

No	susunan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Optimalisasi kualitas dan kinerja penunjang urusan pemerintahan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan**	**95%**	**4.747.673.000**		**5.683.613.409**		**5.896.091.974**		**1.011.319.090**		**1.297.893.164**		**1.214.732.887**		**1.461.696.271**		**4.985.641.412**		**10.669.254.821**		**224,73**	**BAPPEDA**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tingkat pemenuhan sistematika dan waktu penyusunan dokumen**	**100%**	**10.500.000**		**13.000.000**		**13.000.000**		**6.000.000**		-		-		**7.000.000**	**100,00**	**13.000.000**		**26.000.000**		**247,62**	**BAPPEDA**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000		-		-		-	100,00	2.000.000	1 Dok	4.000.000			BAPPEDA
		Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1.500.000	1 Dok	1.500.000	1 Dok	1.500.000		-		-		-	100,00	1.500.000	1 Dok	3.000.000			BAPPEDA
		Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1.500.000	1 Dok	1.500.000		-		-		-	1 Dok	1.500.000	100,00	1.500.000	1 Dok	3.000.000			BAPPEDA
		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD					2.500.000	1 Dok	2.500.000	1 Dok	2.500.000		-		-		-	100,00	2.500.000	1 Dok	5.000.000			BAPPEDA
		Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					2.500.000	1 Dok	2.500.000		-		-		-		2.500.000	100,00	2.500.000	1 Dok	5.000.000			BAPPEDA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1.000.000	1 Lap	1.000.000		-		-		-		1.000.000	100,00	1.000.000	1 Lap	2.000.000			BAPPEDA
		Evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.000.000	3 Lap	2.000.000		-		-		-		2.000.000	100,00	2.000.000	3 Lap	4.000.000			BAPPEDA
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase terpenuhinya akuntabilitas pengelola keuangan**	**95%**	**2.698.917.600**		**2.990.464.332**		**4.055.040.878**		**837.603.543**		**963.359.819**		**862.167.072**		**733.487.105**	**83,76**	**3.396.617.539**		**6.387.081.871**		**236,65**	**BAPPEDA**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.811.764.332	25 Org	3.941.890.878	25 Org	818.403.543	25 Org	944.659.819	25 Org	843.467.072	25 Org	686.287.105	83,53	3.292.817.539	25 Org	6.104.581.871			BAPPEDA
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD					177.700.000	1 Dok	112.200.000	1 Dok	18.700.000	1 Dok	18.700.000	1 Dok	18.700.000	1 Dok	46.750.000	91,67	102.850.000	1 Dok	280.550.000			BAPPEDA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1.000.000	1 Lap	950.000	1 Lap	800.000		-		-	1 Lap	450.000	100,00	950.000	1 Lap	1.950.000			BAPPEDA
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Rasio ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**30%**	**90.810.000**		**102.625.000**		**63.744.000**		-		-		**3.720.000**		**49.097.781**	**82,86**	**52.817.781**		**155.442.781**		**171,17**	**BAPPEDA**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					20.625.000	25 Org	-		-		-		-		-	0,00			20.625.000			BAPPEDA
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					27.000.000	25 Org	27.000.000					25 Org	3.720.000	25 Org	14.100.000	66,00	17.820.000	25 Org	44.820.000			BAPPEDA
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					55.000.000	5 Org	36.744.000				-		-	5 Org	34.997.781	95,25	34.997.781	5 Org	89.997.781			BAPPEDA
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase ketercukupan administrasi perkantoran**	**95%**	**937.380.000**		**1.215.444.409**		**1.044.656.976**		**66.386.304**		**203.123.779**		**199.643.401**		**424.944.726**	**85,59**	**894.098.210**		**2.109.542.619**		**225,08**	**BAPPEDA**
		Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.834.200	1 Paket	5.396.726	1 Paket	1.381.542		-	1 Paket	1.565.592	1 Paket	1.296.508	74,93	4.043.634	1 Paket	14.877.834			BAPPEDA
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					150.937.550	1 Paket	9.500.000		-		-		-	1 Paket	9.500.000	100,00	9.500.000	1 Paket	160.437.550			BAPPEDA
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					115.536.700	1 Paket	101.231.000	1 Paket	5.572.400	1 Paket	20.081.000	1 Paket	16.128.800	1 Paket	40.792.100	81,57	82.574.300	1 Paket	198.111.000			BAPPEDA
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					63.556.300	1 Paket	56.981.250		-		-	1 Paket	18.420.600	1 Paket	21.809.000	70,60	40.229.600	1 Paket	103.785.900			BAPPEDA

No	sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					10.000.000	1 Dok	10.000.000				-	1 Dok	4.240.000	1 Dok	5.420.000	96,60	9.660.000	1 Dok	19.660.000			BAPPEDA
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					95.569.950	1 Lap	73.600.000		-	1 Lap	6.400.000			1 Lap	64.000.000	95,65	70.400.000	1 Lap	165.969.950			BAPPEDA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					769.089.709	3 Lap	787.448.000	3 Lap	59.432.362	3 Lap	176.642.779	3 Lap	159.488.409	3 Lap	282.127.126	88,01	677.690.676	3 Lap	1.446.780.385			BAPPEDA
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tingkat pemenuhan kebutuhan BMD**	**80%**	**75.107.800**		**404.100.000**		-		-		-					**0,00**			**404.100.000**		**538,03**	**BAPPEDA**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					404.100.000	1 Unit	-		-		-		-		-	0,00		1 Unit	404.100.000			BAPPEDA
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tingkat pemenuhan jasa penunjang perkantoran**	**100%**	**489.722.000**		**551.261.820**		**521.116.220**		**85.497.759**		**125.431.231**		**136.753.712**		**130.477.374**	**91,76**	**478.160.076**		**1.029.421.896**		**210,21**	**BAPPEDA**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.000.000	1 Lap	7.200.000	1 Lap	1.800.000		-	1 Lap	1.800.000	1 Lap	3.358.500	96,65	6.958.500	1 Lap	11.958.500			BAPPEDA
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					110.780.996	1 Lap	98.350.000	1 Lap	14.728.417	1 Lap	21.977.218	1 Lap	31.499.699	1 Lap	23.664.861	93,41	91.870.193	1 Lap	202.651.191			BAPPEDA
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					435.510.824	1 Lap	415.566.220	1 Lap	68.969.342	1 Lap	103.454.013	1 Lap	103.454.013	1 Lap	103.454.013	91,28	379.331.381	1 Lap	814.842.205			BAPPEDA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**BMD dalam kondisi baik dan layak dipakai**	**80%**	**445.235.600**		**406.717.848**		**198.533.900**		**15.831.484**		**5.978.335**		**12.448.702**		**116.689.285**	**76,03**	**150.947.806**		**557.665.654**		**125,25**	**BAPPEDA**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan					5.036.097	2 Unit	13.250.000		-		-	2 Unit	1.276.390	2 Unit	3.484.332	35,93	4.760.722	2 Unit	9.796.822			BAPPEDA
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan					190.373.848	2 Unit	143.283.900	2 Unit	11.070.484	2 Unit	5.978.335	2 Unit	4.971.309	2 Unit	94.940.953	81,63	116.961.082	2 Unit	307.334.921			BAPPEDA
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					53.714.724	1 Unit	42.000.000	1 Unit	4.761.000		-	1 Unit	6.201.000	1 Unit	18.264.000	69,59	29.226.000	1 Unit	82.940.724			BAPPEDA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					157.593.187	1 Unit	-		-		-		-		-	0,00		1 Unit	157.593.187			BAPPEDA
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	**84,56**						
																	Predikat kinerja	**Tinggi**						
2	**Optimalisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Penjaberan Konsistensi program RKPD kedalam APBD**	**95%**	**1.701.071.000**		**1.184.561.524**		**878.455.600**		**145.636.400**		**218.349.400**		**247.358.000**		**165.406.000**		**776.749.800**		**1.961.311.324**		**115,30**	**BAPPEDA**
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu**	**100%**	**991.307.000**		**777.966.400**		**838.725.600**		**145.636.400**		**218.349.400**		**216.640.000**		**156.666.000**	**87,91**	**737.291.800**		**1.515.258.200**		**152,85**	**BAPPEDA**
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah					18.510.000	1 Dok	9.000.000			1 Dok	9.000.000					100,00	9.000.000	1 Dok	27.510.000			BAPPEDA
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya					43.716.000	1 Dok	4.000.000		-	1 Dok	2.500.000					62,50	2.500.000	1 Dok	46.216.000			BAPPEDA
		Pelaksanaan Konsultasi Publik					54.636.400	1 Berita Acara	54.636.400	1 Berita Acara	38.946.400		10.090.000					89,75	49.036.400	1 Berita Acara	103.672.800			BAPPEDA
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD					38.490.000	1 Berita Acara	46.631.400	1 Berita Acara	38.490.000		-		-		-	82,54	38.490.000	1 Berita Acara	76.980.000			BAPPEDA

No	sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					136.794.000	1 Berita Acara	255.597.800	1 Berita Acara	68.200.000	-	177.085.400	-	-	-	-	95,97	245.285.400	1 Berita Acara	382.079.400			BAPPEDA
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan					64.290.000	1 Tahun	5.000.000	-	-	1 Tahun	5.000.000	-	-	-	-	100,00	5.000.000	1 Tahun	69.290.000			BAPPEDA
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota					421.530.000	4 Dok	463.860.000	-	-	1 Dok	14.674.000	2 Dok	216.640.000	1 Dok	156.666.000	83,64	387.980.000	4 Dok	809.510.000			BAPPEDA
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Penyediaan Data Informasi Perencanaan Tepat Waktu**	100%	590.370.000		**40.200.000**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-	-	**40.200.000**		**6,81**	**BAPPEDA**
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					40.200.000	1 Sistem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	1 Sistem	40.200.000			BAPPEDA
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					-	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	1 Dok	-			BAPPEDA
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase ketersediaan dokumen evaluasi,pelaporan Triwulan dan Tahunan tepat waktu**	100%	119.394.000		**366.395.124**		**39.730.000**	-	-	-	-	-	**30.718.000**	-	**8.740.000**	**99,32**	**39.458.000**		**405.853.124**		**339,93**	**BAPPEDA**
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota					366.395.124	2 Dok	39.730.000	-	-	-	-	1 Dok	30.718.000	1 Dok	8.740.000	99,32	39.458.000	2 Dok	405.853.124			BAPPEDA
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						8 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		8 Dok				BAPPEDA
																		88,42						
																		Predikat kinerja	**Tinggi**					
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Cakupan Dokumen Perencanaan yang terfasilitasi sesuai dengan ketentuan**	90%	1.235.696.000		**429.194.315**		**114.430.000**		**4.080.000**		**9.480.000**		**21.213.000**		**67.587.500**		**102.360.500**		**531.554.815**		**43,02**	**BAPPEDA**
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase capaian jumlah kegiatan yang memenuhi target bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	100%	304.158.000		**247.702.030**		**31.890.000**		**4.080.000**		**6.380.000**		**5.668.000**		**11.377.500**	**86,28**	**27.505.500**		**275.207.530**		**90,48**	**BAPPEDA**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD,RKPD)					19.458.100	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	1 Dok	19.458.100			BAPPEDA
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						1 Lap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		1 Lap	-			BAPPEDA
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						1 Lap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		1 Lap				BAPPEDA
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia (RPJPD,RPJMD,RKPD)					32.736.000	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		1 Dok	32.736.000			BAPPEDA
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						1 Lap	2.300.200	-	-	1 Lap	2.300.000	-	-	-	-	100,00	2.300.000	1 Lap	2.300.000			BAPPEDA

No	sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					28.266.000	1 Lap	-									0,00		1 Lap	28.266.000			BAPPEDA
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					167.221.000	2 Lap	29.390.000	2 Lap	4.080.000	2 Lap	4.080.000	2 Lap	5.668.000	2 Lap	11.377.500	85,18	25.205.500	2 Lap	192.427.430			BAPPEDA
		Koordinasi perencanaan Bidang perekonomian dan SDA (Sumber Days Alam)	**Persentase capaian jumlah program kegiatan yang memenuhi target bidang perekonomian dan SDA**	**90%**	**381.505.200**		**77.796.285**		**76.270.000**		-		**3.100.000**		**14.780.000**		**52.390.000**	**92,13**	**70.270.000**		**148.066.285**		**38,81**	**BAPPEDA**
		Asisten Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					2.600.000	5 Lap	-		-		-		-		-	0,00		5 Lap	2.600.000			BAPPEDA
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					59.596.285	5 Lap	41.920.000		-		-	1 Lap	9.350.000	1 Lap	30.140.000	94,20	39.490.000	5 Lap	99.086.285			BAPPEDA
		Asisten Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						4 Lap	-		-		-		-		-	0,00	-	4 Lap	-			BAPPEDA
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA					15.600.000	4 Lap	34.350.000		-	1 Lap	3.100.000	2 Lap	5.430.000	1 Lap	22.250.000	89,61	30.780.000	4 Lap	46.380.000			BAPPEDA
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang infrastruktur dan Kewilayahan**	**85%**	**550.032.800**		**103.696.000**		**6.270.000**		-		-		**765.000**		**3.820.000**	**73,13**	**4.585.000**		**108.281.000**		**19,69**	**BAPPEDA**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD,RKPD)					3.370.000	1 Dok	-		-		-		-		-	0,00	-	1 Dok	3.370.000			BAPPEDA
		Asisten Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					510.000	5 Lap	-		-		-		-		-	0,00	-	5 Lap	510.000			BAPPEDA
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					2.000.000	14 Lap	2.220.000		-		-		-	14 Lap	2.220.000	100,00	2.220.000	14 Lap	4.220.000			BAPPEDA
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					97.476.000	5 Lap	4.080.000		-		-	1 Lap	765.000	4 Lap	1.600.000	58,40	2.365.000	5 Lap	99.841.000			BAPPEDA
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan					340.000	1 Lap	-		-		-		-		-	0,00	-	1 Lap	340.000			BAPPEDA
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	**89,45**						
																	Predikat kinerja	**Tinggi**						
																	Rata-rata capaian kinerja total (%)	**88,13**						
																		Tinggi						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Perencanaan yang baik yang selaras dengan pelaksanaan kegiatan
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Refocussing Anggaran
Jumlah jumlah yang diperlukan dalam triwulan berikutnya" : Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan poin referensinya
Jumlah jumlah yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya" : Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Sebagai bagian dari fungsi pokok manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah, maka penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah mengacu dan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Mengacu kepada ketentuan tersebut, perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam jangka pendek (tahunan), jangka menengah (lima tahunan), dan jangka panjang (dua puluh tahunan).

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2023, Bappeda memberikan pelayanan dalam bidang perencanaan, penganggaran, koordinasi pembangunan, serta pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

a) Pelayanan Bidang Perencanaan

Pada tahun 2024, Bappeda Kabupaten Labuhanbatu memberikan pelayanan dalam bidang perencanaan yaitu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Dimana Beberapa Kendala yang dihadapi dalam pelayanan di bidang perencanaan antara lain adalah :

1. Terbatasnya data dan informasi sebagai dasar penetapan indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah.
2. Koordinasi pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan yang masih lemah.
3. Terbatasnya kapasitas aparatur perencana dalam melakukan perkiraan, penetapan tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang terukur.

b) Pelayanan Bidang Koordinasi Pembangunan Daerah

Dalam bidang koordinasi pembangunan pada tahun 2024, Bappeda Kabupaten Labuhanbatu memberikan pelayanan yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa dan Kecamatan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Kendala yang dihadapi dalam pelayanan di bidang koordinasi pembangunan antara lain adalah :

1. Masih relatif rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penetapan program dan kegiatan SKPD.
2. Belum optimalnya forum SKPD dalam menampung usulan yang dihasilkan dari Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat dan stakeholder terkait isu gender dalam usulan program dan kegiatan.
4. Kurangnya publikasi dan sosialisasi hasil Musrenbang.
5. Terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hasil Musrenbang.

c) Pelayanan Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Pelayanan Bappeda di bidang pengendalian dan evaluasi pada tahun 2024 adalah penyusunan dokumen evaluasi renja seluruh OPD tiap triwulannya.

Kendala yang dihadapi dalam pelayanan di bidang pengendalian dan evaluasi antara lain adalah:

1. Adanya berbagai peraturan yang format standar evaluasi kinerja terus mengalami perubahan.
2. Terbatasnya data dan informasi sebagai dasar penilaian kinerja, dan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD.
3. Tersebarnya data dan informasi di berbagai OPD yang menyebabkan terlambatnya pengolahan data dan pelaporan hasil.
4. Belum adanya standarisasi data dan informasi sebagai dasar penilaian kinerja,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Belum terpadunya pengelolaan data dan informasi dalam suatu sistem informasi manajemen pembangunan daerah.
6. Terbatasnya kapasitas dan SDM aparatur dalam teknis pengendalian dan evaluasi.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Visi adalah pandangan jauh kedepan tentang sesuatu yang ingin dicapai. Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka Visi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LABUHANBATU
YANG BERKARAKTER, MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2024"

Visi tersebut merupakan kondisi Kabupaten Labuhanbatu yang ingin dicapai melalui beberapa misi pembangunan sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan profesional.

Pada misi ini yang akan dicapai adalah terlaksananya percepatan reformasi birokrasi pemerintahan yang baik dan profesional, dan terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat untuk semua suku, ras dan golongan yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif yang inovatif.

Pada misi kedua ini, yang menjadi prioritas adalah meningkatkan pelayanan pendidikan yang dan kesehatan yang berkualitas, dan ditandai dengan peningkatan Produktifitas dan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baik dengan terus melakukan inovasi.

Misi 3 : Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM serta industri kreatif.

Meningkatnya Nilai daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas dan nilai tambah ekonomi berbasis potensi daerah dan inovatif, Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui pengembangan Koperasi, UMKM dan Industri kreatif.

Misi 4 : Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna percepatan pengembangan wilayah dan kawasan.

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan umum, infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah, serta meningkatnya system transportasi, dan mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal penting untuk meningkatkan pelayanan akses infrastruktur.

Misi 5 : Meningkatnya rasa aman, nyaman dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

Rasa aman dan nyaman, selain dapat menciptakan pola fikir positif, juga menjadi dasar kuat untuk mendorong motivasi harmonisasi dan investasi. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan ditengah kehidupan bermasyarakat yang majemuk menjadi salah satu dasar percepatan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu.

Memperhatikan Visi dan Misi diatas, maka dalam terkait dengan tugas dan fungsi, Bappeda Kabupaten Labuhanbatu mendukung tugas-tugas dalam pencapaian Misi 1 Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud, yaitu:

"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan profesional".

3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian/Lembaga pengampu urusan perencanaan yang relevan tugas dan fungsi dari Bappeda Kabupaten Labuhanbatu adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas. Untuk itu, agar dapat mengemukakan apa saja faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan Bappeda Kabupaten Labuhanbatu perlu adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024. Adapun sasaran strategis dimaksud, adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel", yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari:
   a. Persentase keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga dan Daerah;
   b. Rancangan Perpres RKP;
   c. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti Kementerian/Lembaga;

2. Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas. Berdasarkan sasaran strategis Renstra Kementerian PPN/Bappenas diatas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Bappeda Kabupaten Labuhanbatu adalah :
   Faktor penghambat :
   1. Rendahnya persentase keselarasan rencana pembangunan Pusat dan Daerah;
   2. Belum optimalnya rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti.

Faktor pendorong:

Faktor pendorong berdasarkan hasil telaah Renstra Bappenas adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia, yaitu merubah paradigma perencanaan "money follow function" menjadi "money follow program priority" dengan pendekatan perencanaan holistik-tematik, integratif dan spasial.

Tabel 3.2.
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten Labuhanbatu terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Kabupaten Labuhanbatu	Provinsi Sumatera Utara	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	RPJMD dan RKPD yang memiliki tujuan, target dan sasaran yang jelas serta terukur	sesuai	sesuai	sesuai
2.	Persentase kesesuaian antara muatan RPJMD dengan RPJPD	100%	100%	100%
3.	Persentase kesesuaian antara muatan RPJMD dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah	100%	100%	100%
4.	Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dan RPJMD	100%	100%	100%
5.	Renja SKPD yang memiliki tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur serta sesuai dengan RPJMD	100%	100%	100%
6.	Renja SKPD yang memiliki tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur serta sesuai dengan RKPD	100%	100%	100%
7.	Dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu	ada	ada	ada
8.	Dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Labuhanbatu	ada	ada	ada
9.	Dokumen RKPD Kabupaten Labuhanbatu	ada	ada	ada

No	Indikator Kinerja	Kabupaten Labuhanbatu	Provinsi Sumatera Utara	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
10.	Dokumen Renja Bappeda Kabupaten Labuhanbatu	ada	ada	ada
11.	Dokumen perencanaan sektoral Kabupaten Labuhanbatu	ada	ada	ada
12.	Kesesuaian dokumen perencanaan antara SKPD	sesuai	sesuai	sesuai
13.	Kesesuaian dokumen perencanaan RPJMD dengan SKPD	sesuai	sesuai	sesuai
14.	Kesesuaian dokumen Renstra SKPD dengan RKPD	sesuai	sesuai	sesuai
15.	Kesesuaian program dan kegiatan perencanaan antara RKPD dengan SKPD	sesuai	sesuai	sesuai
16.	Dokumen pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu	ada	ada	ada
17.	Dokumen pelaporan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu	ada	ada	ada
18.	Dokumen laporan tugas	ada	ada	ada

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan jangka menengah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2024
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Optimalisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat dalam RKPD	70%
		Persentase Kesesuaian program lima tahunan dengan program tahunan	100%
		Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan pembangunan daerah	100%
		Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan program/ kegiatan	100%
		Persentase usulan pokir dalam RKPD	100%
Terselenggaranya tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel	Konsistensi penyusunan dokumen SAKIP dan laporan keuangan	Capaian penyusunan dokumen SAKIP dan capaian penyusunan laporan keuangan	100% 100%
	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah	Cakupan barang milik daerah yang terinventarisasi dengan baik	100%
	Tingkat pemenuhan penunjang urusan kantor	Capaian pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100%

3.4. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Labuhanbatu selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Dengan melaksanakan analisa terhadap gambaran pelayanan SKPD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, dengan langkah-langkah dan faktor yang dapat mempengaruhinya melalui analisa SWOT, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan antar bidang dan koordinasi eksternal antar SKPD
2. Menetapkan indikator kinerja yang terukur dan seragam pada proses perencanaan pembangunan daerah
3. Melaksanakan penghimpunan dan analisis terhadap hasil pemantauan pelaksanaan rencana untuk peningkatan capaian pelaksanaan program/kegiatan
4. Menyusun evaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan rencana periode berikutnya
5. Mengkoordinir penyusunan dan penerapan kebijakan tata ruang dan wilayah di Kabupaten Labuhanbatu
6. Mengembangkan standar pelayanan administrasi perkantoran
7. Menyediakan operasionalisasi perkantoran
8. Melaksanakan konsultasi publik, Musrenbang dan Forum SKPD dengan memberi kesempatan sebesar-besarnya atas partisipasi masyarakat
9. Melaksanakan program peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan
10. Menyediakan sarana prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan pelayanan
11. Menyediakan sistem pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah yang seragam pada seluruh SKPD
12. Menumbuhkembangkan inovasi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan penetapan strategi tersebut, maka kebijakan yang diambil sebagai pedoman dalam pelaksanaan strategi dimaksud adalah:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dipastikan

berpedoman pada RPJMD.

2. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana yang efektif dan efisien
3. Pengembangan pola perbaikan yang terjadi secara terus-menerus pada proses perencanaan
4. Menyusun kebijakan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
5. Melaksanakan koordinasi pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang
6. Penerapan standar operasional prosedur pelayanan
7. Penyediaan operasionalisasi rutin kantor
8. Pelaksanaan proses perencanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan
9. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pegawai
10. Pengadaan, peningkatan dan pemanfaatan sarana prasarana yang optimal
11. Penerapan manajemen data serta pengelolaan penelitian dan pengembangan yang mendukung proses perencanaan pembangunan daerah
12. Pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan secara optimal.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sebagai langkah lanjutan dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah pokok yang diambil untuk menindaklanjuti kebijakan dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selanjutnya akan dijabarkan kedalam rencana kegiatan. kegiatan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja terkait bersama seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemilihan kegiatan untuk masing- masing program didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD yang kemudian ditetapkan secara terukur melalui indikator. Indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan OPD.

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Labuhanbatu untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Program dan kegiatan OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. LABUHANBATU TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**7.628.609.589,00**							**7.689.904.900,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.628.609.589,00**							**7.689.904.900,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**7.628.609.589,00**							**7.689.904.900,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Terlaksananya Urusan Pemerintahan* *Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan*	95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 %			**12 Bulan** **90 %**	**6.159.911.989,00**						95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 %	**6.294.017.900,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen 100 %				55.800.000,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		100 Persen 100 %	153.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Dokumen	2.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Dokumen	1.575.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Dokumen	1.575.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Dokumen	2.625.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Dokumen	2.625.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Laporan	1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			3 Laporan	2.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Laporan	2.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				4 Dokumen	21.400.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				600 Data	21.400.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya Persentase terpenuhinya akuntabilitas keuangan Persentase terpenuhinya akuntabilitas pengelola keuangan Persentase terpenuhinya akuntabilitas pengelola keuangan*	95 Persen 95 %			29 Orang 90 % 90 % 90 Persen	3.360.300.000,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN Bappeda Kabupaten Labuhanbatu	90 Persen 90 %	3.600.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan			25 Orang/bulan	3.250.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN Bappeda Kabupaten Labuhanbatu	25 Orang/bulan	3.400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	109.800.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN Bappeda Kabupaten Labuhanbatu	1 Dokumen	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN Bappeda Kabupaten Labuhanbatu	1 Laporan	600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Rasio ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Rasio ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Rasio ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	30 Persen 30 %			30 % 30 Persen 30 %	116.720.000,00						30 Persen 30 %	109.068.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	51.100.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			48.568.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang			26 Orang	35.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		27 Orang	28.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang			5 Orang	30.620.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		5 Orang	32.151.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		95 Persen 95 %			-	1.293.963.000,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		95 Persen 95 %	1.439.175.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	5.356.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Paket	11.375.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	14.032.500,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Paket	76.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			3 Paket	101.275.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Paket	102.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	27.717.500,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Paket	38.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Dokumen	10.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			1 Laporan	85.570.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Laporan	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan			1 Laporan	1.030.032.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		3 Laporan	1.100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		80 Persen 80 %				456.536.089,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		80 Persen 80 %	39.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	456.936.089,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Unit	36.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen 100 %			-	581.035.400,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		100 Persen 100 %	654.288.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	7.200.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Laporan	10.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	111.750.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Laporan	123.788.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	462.085.400,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Laporan	520.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80 % 80 Persen			-	295.157.500,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		80 % 80 Persen	300.485.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit			24 Unit	13.250.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		2 Unit	12.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.09.0002	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			24 Unit	198.207.500,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		2 Unit	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit			1 Unit	33.700.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Unit	35.385.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Unit	52.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD*** ***Penjabaran Konsistensi program RKPD ke dalam APBD***	**95 persen** **95 persen** **95 persen** **95 persen**			**85 persen** **90 persen**	**1.024.721.700,00**						**90 persen** **90 persen** **90 persen** **90 persen**	**1.165.387.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Penganaan	*persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu Persentase Ketersediaan Perencanaan Tepat Waktu*	100 Persen 100 %			100 % 100 Persen 100 %	812.360.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	Perangkat Daerah	100 Persen 100 %	855.087.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen			2 Dokumen	13.590.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	Perangkat Daerah	1 Dokumen	27.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen			2 Dokumen	19.240.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah	1 Dokumen	300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara			2 Berita Acara	55.036.400,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Perangkat Daerah	1 Berita Acara	300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara			1 Berita Acara	56.921.400,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Perangkat Daerah	1 Berita Acara	59.456.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara			2 Berita Acara	132.993.900,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Perangkat Daerah	1 Berita Acara	139.830.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Usulan			1500 Usulan	83.610.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Perangkat Daerah	1 Usulan	90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD).	4 Dokumen			4 Dokumen	470.969.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah	4 Dokumen	450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100 Persen 100 %			-	86.630.000,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-	100 Persen 100 %	110.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen			1 Dokumen	28.400.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Dokumen	45.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku			2 Buku	58.230.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah		1 Buku	65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100 % 100 Persen				94.931.000,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah		100 % 100 Persen	165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan			4 Laporan	94.931.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah		2 Laporan	125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Bekala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan			2 Laporan	0,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah		8 Laporan	40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						30.800.000,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	30.800.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Cakupan Dokumen Perencanaan yang terfasilitasi sesuai dengan ketentuan***	**85 persen**			**85 persen**	**443.975.900,00**						85 persen	**230.500.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase capaian jumlah kegiatan yang memenuhi target bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase capaian jumlah kegiatan yang memenuhi target bidang pemerintahan dan pembangunan manusia*	100 Persen			100 % 100 Persen	252.503.900,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		100 Persen	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen			3 Dokumen	14.610.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Dokumen	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan			2 Laporan	31.920.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan			2 Laporan	30.600.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen			5 Dokumen	18.866.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan			0 Laporan	33.266.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan			2 Laporan	10.494.900,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan			5 Laporan	112.747.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		2 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	90 Persen				139.962.000,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		90 Persen	156.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan			5 Laporan	2.560.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		5 Laporan	10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Laporan			2 Laporan	75.972.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		5 Laporan	110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan			4 Laporan	3.870.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		4 Laporan	7.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan			1 Laporan	57.590.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		4 Laporan	29.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		85 Persen				51.520.000,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		90 Persen	59.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen			1 Dokumen	15.080.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		1 Dokumen	18.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan			5 Laporan	5.940.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		5 Laporan	6.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	14 Laporan			1 Laporan	5.260.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		14 Laporan	7.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan			1 Laporan	25.240.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial		5 Laporan	28.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	JUMLAH							**7.628.609.589,00**							**7.689.904.900,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan seperti melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya serta menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rantauprapat, Juli 2024

Kepala Bappeda
Kabupaten Labuhanbatu

HOBOL ZULKIFLI RANGKUTI, S.Sos, MM
NIP. 19641121 198602 1 001